

***SUB-DISTRICT LEADERSHIP WITH PUBLIC AWARENESS
IN PAYING LAND AND BUILDING TAX IN GILIRENG
SUB-DISTRICT, WAJO REGENCY***

Herlina Sakawati¹, Besse Heriayu², Novayanti Sopia Rukmana^{3*}
¹²³Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Jurusan Ilmu Administrasi
Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Makassar
*e-mail Correspondence: novayanti@unm.ac.id

ABSTRACT

This study aims to determine the relationship between sub-district leadership and community awareness in paying land and building taxes in Gilireng District, Wajo Regency. This study used quantitative methods. To achieve this goal, data collection techniques in the form of observation, questionnaires and documentation are used. The samples used were 95 samples. The data obtained was processed using data analysis and using the SPSS 25 application consisting of normality tests, linearity tests, validity tests, reliability tests and regression tests. The results showed that the Subdistrict Leadership variable (X) consisted of indicators of leadership style, leadership traits and contingency approach. Meanwhile, in variable Y which consists of indicators of the social structure of the community, the government's efforts to socialize taxes and procedures that make it easier to pay taxes have a positive and significant influence. This is evidenced by the results of a simple linear regression analysis with a correlation coefficient of 70%.

Keywords: *Sub-district Leadership, Community Awareness, Regression*

PENDAHULUAN

Pelaksanaan pembangunan di daerah merupakan bagian yang integral dari pembangunan nasional yang berdasarkan prinsip otonomi daerah sesuai dengan pelaksanaan yang membuat masyarakat di daerah mandiri dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah beserta prinsip Otonomi Daerah. Untuk mendukung jalannya penyelenggaraan otonomi daerah diperlukan kewenangan yang nyata dan bertanggung jawab di daerah secara proposional yang diwujudkan dengan peraturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan. Manajemen yang baik dalam suatu organisasi sangat tergantung pada kepemimpinan dalam melaksanakan fungsi perencanaan, pengorganisasian, koordinasi, dan kontrol, tidak terkecuali kantor kecamatan. Kantor Kecamatan memiliki pemimpin yang disebut camat. Camat perlu memiliki dan menguasai kemampuan manajerial agar dapat menyelesaikan tugasnya dengan baik. Larasati (2018) mengungkapkan bahwa keberhasilan organisasi sangat tergantung kepada sumber daya manusia, dalam hal ini camat dan seluruh pegawai di bawahnya.

Camat diharapkan mampu menunjukkan kinerja yang baik dalam melaksanakan pekerjaannya, sehingga secara optimal dapat mencapai hasil yang diharapkan dari tugasnya. Hal ini juga dikemukakan oleh Suddin (2012) bahwa camat merupakan faktor yang dominan karena berfungsi sebagai manajer dan supervisor yang dituntut untuk mampu memberikan motivasi dan arahan kepada pegawai sehingga dapat menjalankan tugasnya dengan baik yang mendorong keinginan individu untuk melakukan kegiatan-kegiatan tertentu guna mencapai suatu tujuan. Hal ini selaras dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2018 Pasal 8 Ayat 3 yang menyatakan tugas Camat dalam memimpin Kecamatan yaitu : a) menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di tingkat kecamatan sesuai peraturan perundang undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum; b) mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat; c) mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketraman dan ketertiban umum; dan d) mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah. Tujuannya adalah agar setiap urusan pemerintahan terutama yang berhubungan langsung dengan pelayanan kepada masyarakat tidak lagi terkonsentrasi di tangan kepala daerah, sehingga dengan demikian fungsi pemerintahan dapat terlaksana secara lebih efektif dan efisien

Eksistensi camat sebagai leader dalam organisasi pemerintahan sangat diharapkan untuk membangun motivasi kepada para bawahannya dan membangun kepercayaan pegawai bahwa mereka dibutuhkan. Darmi (2016) menjabarkan bahwa Pemerintah sebagai penyedia layanan publik yang dibutuhkan oleh masyarakat harus bertanggung jawab dan terus berupaya untuk memberikan pelayanan yang terbaik demi peningkatan pelayanan publik. Disisi lain kepuasan masyarakat adalah tolak ukur dari keberhasilan pelayanan publik yang diberikan oleh penyedia layanan publik, oleh sebab itu pelayanan publik harus difokuskan pada pemenuhan kebutuhan masyarakat secara maksimal baik dari segi kualitas

Upaya dalam peningkatan kualitas suatu daerah didukung dari berbagai hal seperti pelayanan public, faktor aturan dan pengorganisasian, faktor kesadaran, dan faktor sumber daya. Pajak sebagai salah satu sumber pembiayaan pembangunan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat perlu terus dikembangkan. Landasan Hukum Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah Undang–Undang Nomor 12 Tahun 1985 Sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan. Secara umum pengertian pajak dirumuskan oleh Soemitro (1988) adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan pajak daerah, yang dignakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah. Hal yang serupa juga dikemukakan oleh Salmah (2018) Pajak Bumi dan Bangunan merupakan pemasukan bagi negara yang cukup potensial terhadap pendapatan negara. Strategisnya Pajak Bumi dan Bangunan tidak lain karena objek pajak meliputi seluruh bumi dan bangunan yang berada dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, namun pada realisasinya pemungutan pajak masih sulit dilakukan oleh negara. Hal ini

disebabkan masih rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dan kepercayaan masyarakat kepada administrasi pengelolaan pajak.

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sangat berpotensi untuk menunjang pendapatan daerah guna melaksanakan otonomi daerah dan pembangunannya. Tujuan utama Pajak Bumi dan Bangunan ini adalah untuk membiayai pelaksanaan otonomi daerah dan pembangunan serta meningkatkan kemandirian daerah dari potensi yang ada. Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa peranan Pajak Bumi dan Bangunan di Indonesia sangat penting, karena sebagian penerimaan Negara, Provinsi maupun Kabupaten/Kota adalah dari penarikan Pajak Bumi dan Bangunan. Penarikan Pajak Bumi dan Bangunan jika dilaksanakan semakin cepat maka hasilnya semakin baik. Untuk meningkatkan penarikan Pajak Bumi dan Bangunan dibutuhkan adanya kesadaran tinggi dari masyarakat sebagai wajib pajak.

Pajak Bumi dan Bangunan termasuk sumber keuangan negara dan pemungutannya sudah didasarkan pada Undang-Undang, ini berarti bahwa pemungutan pajak sudah disepakati bersama antara pemerintah dengan masyarakat. Namun fakta lapangan yang ditemui di Kecamatan Gilireng Kabupaten Wajo dijabarkan pada tabel berikut :

Tabel 1.
Tingkat ketetapan dan realisasi pajak bumi bangunan di Kecamatan Gilireng

Tahun	Ketetapan		Realisasi		Persentase
	STTS	Jumlah	STTS	Jumlah	
2017	13.150	541.668.156	8.290	295.170.643	54%
2018	13.895	573.698.190	7.998	287.225.462	52%
2019	14.241	612.969.200	8.450	398.447.500	54%

Sumber : DISPENDA Kabupaten Wajo, 2020

Berdasarkan Tabel 1, perbandingan antara ketetapan dan realisasi pajak bumi bangunan di Kecamatan Gilireng terpaut jauh antara ketetapan dengan realisasi. Ketetapan jumlah pajak pada tahun 2017 berada pada angka 541.558.156 namun yang terealisasi di lapangan sebanyak 295.170.654. Pada tahun 2018 menunjukkan ketetapan pajak sebanyak 573.698.190 namun yang terealisasi sebesar 287.225.462. Selanjutnya data 2019 menunjukkan ketetapan pajak sebanyak 612.969.200 namun yang terealisasi di lapangan sebanyak 398.447.500. Fakta lain yang pernah terjadi adalah adanya tuntutan Masyarakat di Kabupaten Wajo terkait dengan Pajak Bangunan khususnya pajak bangunan Sarang Burung Walet yang dinilai terlalu memberatkan untuk masyarakat (Post Kota Makassar, 2019). Pajak sebagai salah satu sumber penerimaan dalam negeri merupakan sektor yang potensial, penerimaan dari sektor ini selanjutnya dimanfaatkan oleh pemerintah untuk membangun sarana dan prasarana kepentingan umum. Mengingat betapa pentingnya peran dalam keikutsertaan dalam menanggung pembiayaan negara, maka dituntut adanya kesadaran masyarakat untuk membayar Pajak dan Bangunan dengan benar dan sesuai dengan peraturan

perundangundangan yang berlaku. Namun kenyataannya banyak hambatan yang dihadapi dalam pemungutannya. Windiarti dan Sofyan (2018) menjabarkan kendala tersebut diakibatkan oleh kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak, kondisi masyarakat yang kurang dan bahkan tidak mengerti pajak, sehingga mereka tidak melaksanakan kewajibannya dalam membayar pajak. Mengingat kesadaran masyarakat dalam membayar pajak PBB sangat penting maka untuk meningkatkan penerimaan Negara yang digunakan sebagian besar untuk daerah wajib pajak itu sendiri.

Persepsi masyarakat terkait dengan pajak bumi dan bangunan yang masih dianggap memberatkan akan sangat merugikan bagi Negara (Balada, 2019), oleh karena itu dalam rangka merukngurangi atau bahkan menghilangkan sama sekali hambatan- hambatan tersebut maka perlu diusahakan suatu kondisi yang membuat masyarakat wajib pajak menjadi sadar, serta mau dan mampu membayar pajak. Memberikan bimbingan dan pengarahan kepada masyarakat mengenai pajak merupakan langkah yang paling penting dalam mensosialisasikan pajak tersebut (Adelina, 2013). Hasil penelitian terdahulu seperti yang dilakukan oleh Mustofa (2011) melakukan penelitian mengenai pengaruh penghasilan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan (PBB) di kelurahan tembalang semarang tahun 2009. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada pengaruh yang signifikan antara penghasilan dan kesadaran wajib pajak secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

Terdapat beberapa kajian yang berkesinambungan terkait dengan pengaruh kepemimpinan camat terhadap kesadaran masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan seperti yang dilakukan oleh Resdiana (2016) dengan judul penelitian “Kepemimpinan Inovatif dalam Peningkatan Pelayanan Publik”. Penelitian ini menggunakan Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan metode wawancara. Hasil penelitian ini yaitu upaya peningkatan kualitas pelayanan publik dapat dilakukan dengan berbagai strategi, diantaranya perluasan institusional, penerapan manajemen publik modern, dan perluasan makna demokrasi.

Penelitian yang dilakukan oleh Buyung et.al.,(2019) dengan judul penelitian “Pengaruh Kepemimpinan Lurah Terhadap Peningkatan Kesadaran Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kelurahan Buha Kecamatan Mapanget”. Penelitian menggunakan metode analisa kuantitatif, sedangkan teknik analisa data yang digunakan adalah teknik korelasi antar variabel untuk membuktikan adanya pengaruh dari kepemimpinan terhadap kesadaran masyarakat dalam membayar PBB. Hasil penelitian ini adalah kepemimpinan Lurah di Kota Padang dikategorikan tinggi, ini disebabkan karena lurah menjalankan fungsi kepemimpinan dengan baik dan selalu mengikutsertakan masyarakat dalam hal pembayaran PBB. Lurah juga selalu memberi pertanggungjawaban serta realisasi keputusan yang dibuatnya, dalam hal komunikasi lurah menerima masukan dan saran dengan baik. Kesadaran masyarakat di sebelas kelurahan di Kota Padang dikategorikan sedang karena masyarakat belum dengan benar memahami tentang pembayaran PBB, terbukti masih banyak yang keberatan

dengan beban PBB-nya. Namun dalam hal mengetahui kewajiban dan mengerti tujuan PBB masyarakat sudah tergolong baik. Berdasarkan perhitungan rumus dan ketentuan yang dipakai, dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan lurah berpengaruh positif terhadap peningkatan kesadaran masyarakat dalam membayar PBB sebesar 27,7%.

Kaitan kajian yang dilakukan oleh Resdiana (2016) dan Buyung et.al (2019) memiliki beberapa kesamaan terkait dengan kebijakan pemerintah dalam hal ini lurah atau camat selaku pemberi layanan publik yang dapat mempengaruhi kesadaran masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Hal ini juga sejalan dengan yang dikemukakan oleh Akib et.al (2014) bahwa Pelayanan administrasi merupakan pekerjaan yang dipandang sebelah mata tetapi mampu memberikan efek yang signifikan bagi suatu Negara. Pelaksanaan fungsi administrasi perkantoran modern menyangkut 5 (lima) fungsi seperti: 1) Fungsi Manajerial, 2) Interpersonal, 3) Teknis, 4) Rutin, dan Analikesis. (Sakawati et al., 2020) juga mengemukakan bahwa tantangan yang dihadapi pemerintah dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan publik sehingga perlu melibatkan beberapa pemangku kepentingan, mulai dari tingkat pusat hingga tingkat kabupaten. Maka dengan demikian Camat dan Kepala Kelurahan/Desa dijadikan sebagai ujung tombak keberhasilan penerimaan pajak bumi dan bangunan disetiap daerah. Selain itu perlu adanya penataan administrasi yang baik untuk dapat memotivasi anggota masyarakat dalam mencapai tujuan yaitu pembayaran pajak bumi dan bangunan, serta melakukan penyuluhan dalam rangka mendorong kesadaran masyarakat untuk membayar pajak bumi dan bangunan.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, penelitian ini memiliki kesamaan dalam menganalisis adanya pengaruh kepemimpinan tersebut dapat menjadi penggerak maupun pendorong bagi masyarakat sebagai wajib pajak sehingga dapat mempengaruhi kesadaran masyarakat untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Gilireng. Camat juga merupakan tokoh yang disegani oleh masyarakat.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan analisa statistik deskriptif, dengan maksud untuk mengetahui pengaruh antara variabel independent atau variabel mempengaruhi yang berupa kepemimpinan camat dengan variabel dependen atau variabel dipengaruhi yang berupa kesadaran masyarakat dalam membayar pajak. Waktu penelitian yang dibutuhkan kurang lebih selama 3 (tiga) bulan. Berdasarkan latar belakang masalah yaitu tingkat realisasi dan ketetapan pajak bumi bangunan terpaut jauh di Kecamatan Gilireng maka dilakukan penelitian di lokasi ini.

Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah masyarakat di Kecamatan Gilireng Kabupaten Wajo. Penentuan sampel dalam penelitian ini diambil dengan menggunakan metode Tabel Krejcie. Instrumen dan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah berupa data primer yang diperoleh secara langsung ke lokasi penelitian untuk mendapatkan data lengkap dan berkaitan dengan masalah yang diteliti. Data primer tersebut yaitu menggunakan Metode Observasi, Metode Angket.

Untuk mengetahui hubungan variabel X terhadap Y digunakan rumus $Y = a + bX$

Dimana:

Y' = Kesadaran Masyarakat Membayar PBB

a = Nilai Konstan

b = Koefisien Regresi

X = Kepemimpinan Camat

Koefisien arah regresi linear dinyatakan dengan huruf b yang juga menyatakan perubahan rata rata variabel Y untuk setiap variabel X sebesar satu bagian. Bila harga b positif maka variabel Y akan mengalami kenaikan atau penambahan. Sebaliknya jika b negatve maka variabel Y akan mengalami penurunan. Untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel X terhadap variabel Y dapat diketahui dengan menggunakan analisis koefisien determinasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 2.
Hasil Uji Normalitas

<i>One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test</i>		
		<i>Unstandardized Residual</i>
	<i>N</i>	95
<i>Normal Parameters^{a,b}</i>	<i>Mean</i>	.0000000
	<i>Std. Deviation</i>	3.22131909
	<i>Absolute</i>	.103
<i>Most Extreme Differences</i>	<i>Positive</i>	.103
	<i>Negative</i>	-.099
	<i>Test Statistic</i>	.103
	<i>Asymp. Sig. (2-tailed)</i>	.200 ^{c,d}

Sumber : Analisis data, 2023

Hasil pengujian diperoleh nilai signifikansinya adalah $0.200 > 0.05$. Hal ini menunjukkan bahwa data pada penelitian ini berdistribusi normal.

Tabel 3.
Uji linearitas
ANOVA Table

<i>Sum of</i>	<i>df</i>	<i>Mean</i>	<i>F</i>	<i>Sig.</i>
---------------	-----------	-------------	----------	-------------

		Square		Squar			
x * y	Bet wee n	(Combine d)	4745.7 22	12	395.4 77	29.9 06	.000
		Linearity	4542.5 07	1	4542. 507	343. 509	.000
	Gro ups	Deviation from	203.21 6	11	18.47 4	1.39 7	.220
		Linearity					
Within Groups		436.38 6	71	13.22 4			
Total		5182.1 09	95				

Sumber : Analisis data, 2023

Hasil pengujian diperoleh nilai *Deviation drom Linearity sig* adalah $0.220 > 0.05$. Hal ini menunjukkan bahwa ada hubungan linear secara signifikan antara variabel kepemimpinan camat (X) dengan variabel Kesadaran masyarakat membayar PBB (Y).

Tabel 4.
Uji validitas Variabel X

No angket	r hitung	r tabel	Keterangan
Q1	0,868	0,201	Valid
Q2	0,891	0,201	Valid
Q3	0,883	0,201	Valid
Q4	0,878	0,201	Valid
Q5	0,923	0,201	Valid
Q6	0,906	0,201	Valid
Q7	0,881	0,201	Valid
Q8	0,933	0,201	Valid
Q9	0,868	0,201	Valid
Q10	0,883	0,201	Valid

Sumber : Analisis Data, 2023

Berdasarkan hasil uji validitas pada tabel di atas, dapat diketahui nilai yang terlihat bahwa $r \text{ hitung} > r \text{ tabel}$. Sehingga dapat disimpulkan semua pernyataan pada variabel Kepemimpinan Camat (X) adalah valid.

Tabel 5.
Uji validitas Variabel Y

No angket	r hitung	r tabel	Keterangan
Q11	0,902	0,201	Valid

Q12	0,881	0,201	Valid
Q13	0,785	0,201	Valid
Q14	0,893	0,201	Valid
Q15	0,841	0,201	Valid
Q16	0,882	0,201	Valid
Q17	0,887	0,201	Valid
Q18	0,817	0,201	Valid
Q19	0,705	0,201	Valid
Q20	0,692	0,201	Valid
Q21	0,890	0,201	Valid

Sumber : Analisis Data, 2023

Berdasarkan hasil uji validitas pada tabel di atas, dapat diketahui nilai yang terlihat bahwa r hitung > r tabel. Sehingga dapat disimpulkan semua pernyataan pada variabel Kesadaran masyarakat membayar PBB (Y) adalah valid.

Tabel 6.
Hasil uji realibilitas variabel X
Reliability Statistics

<i>Cronbach's Alpha</i>	<i>N of Items</i>
.925	10

Sumber : Analisis Data, 2023

Tabel 7.
Nilai *crochbach Alpha* tiap item pertanyaan variabel X

	<i>Scale Mean if Item Deleted</i>	<i>Scale Variance if Item Deleted</i>	<i>Corrected Item-Total Correlation</i>	<i>Cronbach's Alpha if Item Deleted</i>
Q1	27.26	82.242	.824	.911
Q2	27.17	82.147	.855	.909
Q3	27.02	81.533	.842	.909
Q4	27.26	84.019	.841	.910
Q5	27.28	84.074	.908	.907
Q6	27.15	82.043	.875	.907
Q7	27.28	85.096	.847	.910
Q8	27.15	81.243	.910	.905
Q9	27.22	105.552	.109	.938
Q10	26.76	109.919	-.167	.950

Sumber : Analisis data, 2023

Berdasarkan dari data tabel di atas, telah diperoleh nilai dari X yaitu melebihi nilai *Cronbach Alpha* > 0,6 dimana untuk nilai variabel Kepemimpinan Camat (X) yaitu 0,925 Sehingga dapat disimpulkan bahwa kuesioner penelitian ini dinyatakan reliabel/konsisten. **Tabel 8.**

Hasil uji realibilitas variabel Y

Reliability Statistics

<i>Cronbach's Alpha</i>	<i>N of Items</i>
.903	11

Sumber : Analisis data, 2023

Tabel 9.

Nilai *crochbach Alpha* tiap item pertanyaan variabel Y

	<i>Item-Total Statistics</i>			
	<i>Scale Mean if Item Deleted</i>	<i>Scale Variance if Item Deleted</i>	<i>Corrected Item-Total Correlation</i>	<i>Cronbach's Alpha if Item Deleted</i>
Q11	29.98	74.955	.863	.880
Q12	29.98	75.666	.835	.882
Q13	30.85	86.443	.737	.891
Q14	29.93	75.973	.852	.881
Q15	30.37	81.349	.794	.886
Q16	30.35	79.343	.844	.882
Q17	30.20	78.916	.850	.882
Q18	30.65	83.654	.769	.888
Q19	29.13	102.116	.009	.916
Q20	29.39	105.221	-.227	.921
Q21	30.91	98.837	.201	.912

Sumber : Analisi data, 2023

Berdasarkan dari data Tabel 20, telah diperoleh nilai dari variabel Y yaitu melebihi nilai *Cronbach Alpha* > 0,6 dimana untuk nilai variabel Kesadaran masyarakat membayar PBB (Y) yaitu 0,903. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kuesioner penelitian ini dinyatakan reliabel/konsisten.

Penelitian yang dilakukan untuk untuk mengetahui hubungan kepemimpinan camat (X) terhadap Kesadaran Masyarakat dalam Membayar pajak Bumi Bangunan (Y) dengan cara membagikan kuesioner ke 95 responden. Adapun item yang diukur mulai dari usia, pekerjaan hingga tingkat pendidikan. Pengukuran variabel X terdiri dari 10 item pernyataan, sedangkan pengukuran variabel Y terdiri atas 11 item

pernyataan. Uraian masing masing variabel serta indikator yang diukur dapat dilihat sebagai berikut:

1. Gambaran Kepemimpinan Camat di Kecamatan Gilireng

Kepemimpinan camat adalah salah satu faktor yang mendukung terjaminnya pelayanan public di lingkup kecamatan. Penyelenggaraan kepemimpinan kecamatan memerlukan adanya seseorang yang menggerakkan bawahannya agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya untuk ikut serta dalam kegiatan pemerintahan, pembangunan masyarakat secara berdayaguna. Terdapat 3 indikator yang menjadi acuan dalam melihat kepemimpinan camat, diantaranya Sifat kepemimpinan, Gaya kepemimpinan, serta pendekatan kontingensi. Hasil pengukuran menunjukkan bahwa responden dominan setuju dengan sifat kepemimpinan dengan persentase sebesar 42%. Hal Hal yang terkait dengan sifat kepemimpinan adalah dengan melihat bentuk empati dan kemampuan dalam mengendalikan iformasi emosional, Hal lain yang juga berkaitan dengan sifat kepemimpinan adalah bagaimana pemimpin memiliki rasa percaya diri yang tinggi dan memiliki sifat antusias serta tanggung jawab yang tinggi juga. Dimiyati (2014) juga mengatakan bahwa sifat pemimpinan tak lepas dari 4 unsur yaitu self confficende, physical endurance, enthusiasm, sense of responsibility and good human realtions. Dalam hal ini Pemimpin wilayah kecamatan Gilireng mneurut pandangan masyarakat memiliki sifat yang berintegritas, kesungguhan serta keterbukaan bagi masyarakat.

Indikator yang kedua dalam mengukur kepemimpinan camat adalah Gaya Kepemimpinan. Berbagai jenis gaya kepemimpinan seperti gaya otoriter, demokratis, kharismatik, dan sebagainya. Gaya kepemimpinan menjadi cara pemimpin untuk mempengaruhi bawahannya yang dinyatakan dalam bentuk pola tingkah laku atau kepribadian (Adji et.al, 2022). Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa pada indikator gaya kepemimpinan, responden cenderung setuju dengan persentase sebesar 42%. Hal ini menunjukkan bahwa kepemimpinan camat yang memberi arahan serta mengoptimalkan memberikan motivasi kepada masyarakat terkait dengan kesadaran membayar pajak bumi bangunan. Hal ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh Akhmad et.al, 2022 bahwa motivasi yang yang diberikan pemimpin kepada satuan kerja dengan mengan terus mengontrol dan mengaawasi serta menggunakan inovasi yang efektif mampu meningkatkan program kerja yang lebih baik untuk masyarakat.

2. Gambaran Kesadaran Masyarakat membayar PBB di Kecamatan Gilireng

Kesadaran dapat diartikan sebagai sikap atau perilaku untuk mengetahui atau mengerti, taat dan patuh kepada peraturan dan ketentuan perundangan yang ada, juga merupakan sikap atau perilaku mengetahui atau mengerti, taat dan patuh pada adat istiadat dan kebiasaan dan yang hidup dalam masyarakat (Supriyanto & Wahyudi, 2017). Dalam mengukur tingkat kesadaran masyarakat dalam membayar pajak bumi bangunan adalah dengan menggunakan tiga indikator. Diantaranya adalah struktur social masyarakat yang mencakup lingkungan kekayaan, mentalitas, dan tingkat pendidikan, indikator yang kedua adalah upaya pemerintah dalam mensosialisasikan

PBB, serta indikator ketiganya adalah prosedur yang memudahkan membayar pajak. Berdasarkan hasil pengujian, indikator terkait dengan struktur sosial masyarakat menunjukkan bahwa responden setuju dengan persentase sebesar 31%. Hal ini menandakan bahwa masyarakat yang memiliki pendidikan memiliki kesadaran yang lebih baik dalam membayar pajak. Adapun indikator kedua terkait dengan upaya pemerintah didominasi oleh responden yang setuju. Hal ini juga mengindikasikan bahwa upaya pemerintah yang mensosialisasikan PBB, baik itu manfaat pajak serta sanksi yang berlaku dapat meningkatkan kesadaran masyarakat membayar pajak. Ketakutan akibat sanksi ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh Putra (2018) bahwa sanksi untuk masyarakat sebagai sarana untuk mengontrol masyarakat untuk tetap patuh pada peraturan. Selanjutnya adalah prosedur yang memudahkan membayar pajak didominasi oleh responden yang tidak setuju. Hal ini dapat diartikan bahwa masyarakat belum mampu mengimbangi hal-hal administratif yang dilakukan oleh pihak terkait sehingga responden kebanyakan kurang setuju dengan persentase sebesar 24%.

3. Hubungan Kepemimpinan Camat Terhadap Kesadaran Masyarakat Membayar PBB di Kecamatan Gilireng

Hubungan kepemimpinan camat terhadap kesadaran masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan (PBB) adalah dengan menggunakan uji analisis regresi sederhana. Dimana hasil pengujian menunjukkan bahwa Kepemimpinan Camat memberikan pengaruh yang positif terhadap kesadaran masyarakat membayar pajak. Adapun nilai Standardized Coefficients Beta yang diperoleh sebesar 0,893 yang dapat berarti bahwa setiap kali peningkatan kepemimpinan camat maka akan juga meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak. Adapun besarnya pengaruh X dan Y adalah sebesar 79,7%. Hal ini dapat dikatakan bahwa kepemimpinan camat memberikan pengaruh yang kuat terhadap kesadaran masyarakat. Hal ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh Sumarauw et.al (2015) mengemukakan bahwa terdapat hubungan dan korelasi antara kepemimpinan camat terhadap kesadaran Masyarakat. Dimana kepemimpinan camat ini bersifat kharismatik menginspirasi, memberikan arahan atau rangsangan serta memberikan perhatian lebih kepada masyarakat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana telah diuraikan pada bagian sebelumnya, adapun kesimpulan dari penelitian ini yaitu: 1) Gambaran Kepemimpinan camat dengan kesadaran masyarakat membayar pajak masuk dalam kategori baik dengan mempertimbangkan indikator pada kepemimpinan camat adalah sifat kepemimpinan, gaya kepemimpinan serta pendekatan kontingensi. Adapun indikator kesadaran masyarakat dalam membayar pajak adalah struktur sosial masyarakat, upaya pemerintah, serta prosedur yang memudahkan membayar pajak; 2) Terdapat pengaruh serta terdapat hubungan antara kepemimpinan camat terhadap kesadaran masyarakat

membayar pajak memiliki hubungan yang kuat dan positif dengan kontribusi pengaruh sebesar 79,7%.

DAFTAR PUSTAKA

- Adelina, R. (2013). Analisis Efektifitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terhadap Pendapatan Daerah di Kabupaten Gresik. *Jurnal Akuntansi AKUNESA*, 1(2).
- Adji, W. H., & Nupardi, D. (2022). Pengaruh Gaya Kepemimpinan Camat Dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai Di Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung. *Jurnal Co Management*, 4(3), 725-733.
- Akhmad, Z., Hasran, H., & Rahman, R. (2022). Pengaruh Kepemimpinan dalam Peningkatan Motivasi Kerja PNS di Kantor Kecamatan. *Journal of Government Insight*, 2(2), 182-197.
- Balada, R. A. F. (2019). Analisis Pajak Bumi dan Bangunan Dalam Persepsi Masyarakat di Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo. *Madani Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan*, 11(3), 271-287.
- Buyung, R., Ogotan, M., & Tampongangoy, D. (2019). Pengaruh Kepemimpinan Lurah Terhadap Peningkatan Kesadaran Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kelurahan Buha Kecamatan Mapanget. *Jurnal Administrasi Publik*, 5(75).
- Darmi, T. (2016). Penerapan Prinsip Good Governance Untuk Layanan Publik. *Jurnal Administrasi Pembangunan*, 4(2), 97-102.
- Dimiyati, A. H., & Saebani, B. A. (2014). Model kepemimpinan dan sistem pengambilan keputusan/A. hamdan dimiyati.
- Larasati, S. (2018). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Deepublish.
- Mustofa, F. A. (2016). *Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Tarif Pajak dan Asas Keadilan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada Wajib Pajak USAha Mikro Kecil dan Menengah yang Berada di Wilayah Kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu Setelah Diberlakukannya Peratu* (Doctoral dissertation, Brawijaya University).
- Putra, I. B. S. (2018). *Sosial Control: Sifat dan Sanksi Sebagai Sarana Kontrol Sosial*. *Vyavahara Duta*, 13(1).
- Resdiana, E. (2016). Kepemimpinan Inovatif dalam Peningkatan Pelayanan Publik. *PUBLIC CORNER*, 11(2).
- Saggaf, S., Salam, R., Kahar, F., & Akib, H. (2014). Pelayanan Fungsi Administrasi Perkantoran Modern. *Jurnal Ad'ministrare*, 1(1), 20–27.
- Sakawati, H., Yamin, M. N., Sulmiah, S., Rukmana, N. S., & Widyawati, W. (2020). Government Challenges in Public Policy Supervision: Community Salt Business Program in Jeneponto Regency South Sulawesi. *International Conference on Science and Advanced Technology (ICSAT)*.
- Salmah, S. (2018). Pengaruh pengetahuan dan kesadaran wajib pajak terhadap

- kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). *Inventory: Jurnal Akuntansi*, 2(1), 151-187.
- Soemitro, R. (1988). *Pajak dan Pembangunan*. PT. Eresco.
- Suddin, A. (2012). Pengaruh kepemimpinan, motivasi, dan lingkungan kerja terhadap kinerja pegawai kecamatan laweyan kota surakarta. *Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia*, 4(1).
- Sumarauw, S. M., Rares, J. J., & Kiyai, B. (2015). Pengaruh Kepemimpinan Camat Terhadap Kesadaran Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Di Kecamatan Eris Kabupaten Minahasa. *Jurnal Administrasi Publik*, 2(30).
- Supriyanto, A., & Wahyudi, A. (2017). Skala karakter toleransi: konsep dan operasional aspek kedamaian, menghargai perbedaan dan kesadaran individu. *Counsellia: Jurnal Bimbingan Dan Konseling*, 7(2), 61–70.
- Windiarti, W., & Sofyan, M. (2018). Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Kota Depok. *Jurnal Ilmiah Ekbank*, 1(2).